

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 1517 hingga tahun 1924, kesultanan Utsmaniyah berkuasa hampir di dua per tiga dunia mewarisi kesultanan kekhalifahan Islam. Akan tetapi Kejayaan Islam yang sudah tegak berdiri sejak 13 abad yang lalu tersebut runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Umat Islam yang dahulu bersatu di bawah penerapan Syariat Islam secara penuh dengan Al-Qur'an sebagai dasar negara hancur tercerai-berai menjadi lebih dari 50 negara.

Runtuhnya khilafah Utsmaniyah menjadi awal penderitaan umat Islam saat ini. Keruntuhan ini terjadi begitu kompleks dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya benar-benar runtuh dengan ditandainya deklarasi perubahan sistem pemerintahan menjadi republik oleh Mustafa Kemal Attaturk. Secara garis besar sejarah menunjukkan bahwa khilafah terlibat perang dunia I di blok poros melawan blok sekutu.

Dalam perang tersebut blok poros akhirnya menjadi pihak yang kalah dan sebagai konsekuensinya mereka dipaksa untuk menerima syarat-syarat perdamaian yang kemudian memicu runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah dituntun untuk melakukan pembagian wilayahnya ke tangan sekutu. Artinya mereka harus melepaskan seluruh wilayah Arab, kemudian wilayah Anatolia timur yang dihuni bangsa Armenia, lalu wilayah Anatolia barat yang terletak di Eropa, serta beberapa kota penting untuk berada dibawah kendali sekutu secara *de facto*.

Disamping politik, tampak pula di bidang ekonomi. Pergerakan kapitalis membawa kepada meningkatnya perdagangan eksploratif, mendorong adanya produksi bahan-bahan mentah, dan merosotnya industri lokal. Keadaan ini tentunya secara umum menurunkan perdagangan umat Islam. Kendatipun demikian, ada aspek-aspek lain yang dapat dikatakan memberi keuntungan kepada Islam seperti terbukanya kesempatan kerja bagi yang terpelajar dan terlatih, adanya peluang di bidang perdagangan dengan Eropa, dan yang lebih jelas lagi adanya perkembangan komunikasi.

Berdasarkan hal inilah, Hizbut Tahrir hadir dan masuk pada unsur-unsur kedaulatan Negara. Pada dasarnya, Hizbut Tahrir atau disingkat HT dalam bahasa indonesianya artinya Partai Pembebasan. Organisasi ini digolongkan sebagai partai politik internasional dengan landasan Islam sebagai ideologinya. Sehingga organisasi ini menitikberatkan terhadap ajaran Islam sebagai asas dari partainya. Hizbut Tahrir menerapkan sistem berupa, hukum-hukum serta menyelesaikan persoalan yang ada dengan berlandaskan pada Islam atau hukum Islam.

Organisasi ini didirikan di Negara Palestina pada tahun 1953 oleh Taqiy Al-Din Al-Nabhani. Organisasi ini melihat politik negara itu seharusnya mengatur dan menjaga para rakyatnya sesuai dengan hukum dan Syariat Islam. Oleh sebab itu Hizbut Tahrir aktif dalam mengkampanyekan ide-ide tentang Islam supaya dapat mendirikan kembalinya sistem khilafah supaya hukum-hukum Islam diseluruh dunia dapat ditegakkan. Organisasi ini berbeda dengan partai-partai politik lainnya,

sebab Hizbut Tahrir dalam visinya ingin seluruh dunia hanya memiliki satu sistem politik yaitu khilafah¹.

Al-Nabhani sebelum membentuk organisasi Hizbut Tahrir, dirinya sempat menjadi anggota aktif dari organisasi Ikhwanul Muslimin Yordania, dimana organisasi ini merupakan pengusung gerakan Islam terbesar di mesir. Sebagai organisasi massa, Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hassan Al-Banna dengan tujuan menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai ideologi umat Islam pada 1928. Akan tetapi Al-Nabhani memutuskan untuk keluar karena melihat organisasi Ikhwanul Muslimin Yordania dikarenakan ia ingin melebarkan sayap di berbagai negara bangsa .

Pan-Islamisme sendiri adalah paham yang mengajarkan penganut ajaran agama Islam yang berada di seluruh dunia untuk bersatu dalam melawan perbudakan dari bangsa asing. Dalam pengertian yang lebih luas Pan-Islamisme merupakan sebuah paham atau gerakan solidaritas seluruh umat Muslim diseluruh dunia dalam melawan kolonialisme. Gerakan Pan-Islamisme sendiri memuat landasan-landasan ajaran Islam dalam pengertian nasionalisme².

Sedangkan Pan-Arabisme adalah gerakan atau paham yang bertujuan untuk menyatukan bangsa dan negara-negara di seluruh Arab dan Timur Tengah. Gerakan Pan-Arabisme sama dengan gerakan Pan-Islamisme yaitu memiliki landasan ajaran Islam yang sama dalam pengertian nasionalismenya. Pan-Islamisme dan Pan-

¹ Mohamad Rafiuddin, "MENGENAL HIZBUT TAHRIR (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir Vis a Vis NU)," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 29.

² Sitti Nurtina, "The Dynaics of Applying PanIslamism As a New Politic Concept," *Journal of Islamic World and Politics* 3, no. 1 (2019): 482–498.

Arabisme memiliki visi dan misi yang sama yaitu menjaga budaya dan tradisi agama Islam serta mencegah terjadinya penyebaran budaya, ideologi, dan dominasi politik dari Barat³.

Oleh karena itu, Al-Nabhani melihat bahwa dengan adanya sistem khilafah hukum Allah dapat ditegakkan dan Syariat Islam dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sempurna. Dalam pandangannya Al-Nabhani mewajibkan seluruh umat Islam untuk menegakan kembali khilafah Islam dan umat Islam tidak boleh menolak atau menawar. Al-Nabhani melihat dengan tidak berdiri tegaknya khilafah akan menyebabkan empat masalah penting dalam umat Islam.

Pertama, akan hilangnya seorang pemimpin di tengah-tengah umat, sehingga mereka menjadi terpecah-pecah menjadi negara yang kecil serta tidak memiliki kekuatan sehingga dapat dengan mudah di kuasai oleh bangsa yang non-Islam atau bangsa barat. Kedua, dengan tidak adanya khilafah akan menyebabkan kecerobohan dalam menegakan hukum Islam dikarenakan tidak adanya organisasi yang sah sebagai pelaksana atau penyelenggara. Ketiga, dengan tidak berdiri tegaknya khilafah membuat umat Islam lalai dalam menjalankan ajaran Islam serta tidak taat. Keempat, adanya serangan dari bangsa Barat serta Eropa dan disusul oleh kebudayaan asing serta pengaruh politik dan ideologi dari bangsa Barat atau Eropa yang bertujuan untuk mengubah pandangan umat Muslim agar terpengaruh dengan budaya Barat atau Eropa dan meninggalkan agama Islam yang akan berujung pada kehancuran agama Islam. Dari empat masalah utama ini Al-Nabhani sebagai

³ Efraim Karsh and Inari Karsh, "Reflections on Arab Nationalism," *Middle Eastern Studies* 32, no. 4 (1996): 367–392.

pemimpin organisasi Hizbut Tahrir melihat bahwa semua sistem pemerintahan yang ada di dunia tidak bagus kecuali sistem yang di jalankan dengan sistem khilafah.⁴

Pemikiran-pemikiran tersebut tentunya memiliki daya pengaruh yang kuat terhadap segala bidang kehidupan baik di dalam kalangan terdidik yakni akademis, maupun sistem politik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh, Al-Nabhani melihat dengan kedatangan bangsa penjajah dapat memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi umat Islam seperti yang dikemukakan berikut ini:

“Di kalangan terdidik dan terpelajar telah terjadi penjajahan sebelum penjajahan yang sesungguhnya. Dan setelah merdeka dari penjajahan pun banyak sekolah yang masih menggunakan sistem pendidikan, budaya, falsafah bahkan way of life Barat. Inilah yang kemudian menyebabkan kepribadian Barat telah menjadi asas yang mencabut budaya dari akar-akarnya yang asli sebagaimana yang ada dalam sejarah Barat dan kebangkitannya yang telah menutup rasionalitas kita”⁵

Oleh karena itu, Al-Nabhani membuat organisasi Hizbut Tahrir dengan aliran Pan-Islamisme yang dalam pelaksanaannya untuk menyebarkan serta membentuk khilafah Islam atau negara yang berideologi Islam dengan khilafah ini

⁴ İhsan Yılmaz, “Radical Muslim Politics from Comparative Perspective: Theological Deprivation as the Major Source of Hizb Ut-Tahrir’s Influence,” *Uluslararası Hukuk & Politika. Review of International Law and Politics*, no. 6 / 23 (2010): 99–117, <http://bibliographies.brillonline.com/entries/index-Islamicus/radical-Muslim-politics-from-comparative-perspective-theological-deprivation-as-the-major-source-of-hizb-ut-tahrirs-influence-A420333>.

⁵ Azman Azman, “Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 99–113.

Al-Nabhani ingin menyatukan seluruh umat Islam yang ada di dunia menjadi negara kesatuan Islam bukan negara yang federal. Berdirinya Hizbut Tahrir juga didasari oleh sejarah yang panjang dimana dominasi penjajah dari bangsa Barat maupun Eropa sangatlah berkuasa yang membuat peradaban Islam mengalami keterpurukan, maka dari itu banyak sekali munculnya gerakan Islam untuk bangkit dan mempersatukan seluruh umat Muslim. Akan tetapi para penggagas gerakan Islam ini justru makin memperkeruh atau memperburuk suasana karena sebagian besar dari mereka justru beraliansi dengan pihak Barat atau penjajah. Melihat hal itu organisasi Hizbut Tahrir merasa kecewa dengan para penggagas gerakan tersebut.

Kerangka politik harus menjadi aturan mayoritas dan otoritas publik harus lebih terbuka, bertanggung jawab dan didasarkan pada kepentingan publik yang luas. Hal-hal inilah yang menjadi isu-isu pokok dalam persoalan legislasi negara. Hizbut Tahrir muncul di Negara Indonesia dengan misi menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Organisasi Hizbut Tahrir pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1983 dengan diwakili oleh Abdurahman Al-Baghdadi yang merupakan anggota dari organisasi HT dari negara Yordania dan menetap di Bogor.

Pada awalnya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, mereka dalam melaksanakan aktivitasnya melakukan secara tertutup selama 10 tahun. HTI masuk pada era rezim Soeharto yang dalam kepemimpinannya Soeharto melarang segala upaya aktivitas atau organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Setelah rezim Soeharto runtuh, organisasi Hizbut Tahrir baru bisa melakukan aktivitasnya secara terbuka hal ini dibuktikan dengan adanya forum terbuka

mengenai hukum *Syariah* ke berbagai daerah di Indonesia. HTI, melihat bahwa hukum Islam tidak dapat diaplikasikan dengan baik jika tidak adanya sistem khilafah. Sebagai organisasi yang menganut ajaran agama Islam, HTI memiliki gagasan, misi, dan kegiatan utama yaitu, pemikiran dari HT sendiri adalah meliputi akidah Islam atau kepercayaan Islam, dan hukum-hukum Islam yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kehidupan Islam serta mendirikan khilafahnya.⁶

Dalam menegakkan berdirinya khilafah HTI melakukan kegiatan dakwah *siyasi* (refleksi panggilan jiwa), dalam melakukan dakwah *siyasi* HTI menerapkan tiga langkah yaitu, pertama, pembinaan dan pengkaderan, bertujuan untuk membentuk individu yang percaya pada fikrah atau ideologi dari HT tersebut. Kedua, adanya interaksi dengan umat, bertujuan untuk membentuk kesadaran ideologi umat serta mematuhi aturan partai serta dapat menerapkan nilai dan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, mengambil alih kekuasaan, tujuannya agar partai HTI dapat memegang kendali dalam pemerintahan untuk menerapkan Islam secara *kaffah* (menyeluruh) atau sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun, HTI dibentuk sebagai organisasi politik, namun HTI belum pernah mendaftarkan organisasinya secara resmi sebagai partai politik yang ikut serta ke dalam pemilu.⁷

Pada tahun 2000, organisasi HTI mulai berani untuk muncul didepan publik dengan diadakannya Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah yang berlokasi di Senayan Jakarta yang di hadiri sekitar 5000 orang. Pada tahun 2001, organisasi

⁶ Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*.

⁷ Jonkenedi, "No Title," *GERAKAN HIZBUT TAHRIR DAN REALITAS POLITIK ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA* 06 (2012): 1–10.

HTI kembali menyerukan kepada solidaritas Muslim Indonesia untuk melakukan demo di kedubes AS atas serangan yang dilakukan oleh AS ke Afganistan. Pada tahun 2002, HTI juga pernah menggagas untuk melakukan Gerakan massa untuk melakukan *longmarch* dari Monas menuju Senayan untuk menuntut penerapan *Syari'ah Islamiyah* di Indonesia yang dilakukan di gedung MPR. Pada tahun 2014, HTI kembali mengorganisir sekitar 20 ribu masa *longmarch* dari Monas menuju Bunderan Hotel Indonesia Jakarta untuk memprotes agar dapat ditegakkan *Syariah* dan khilafah di Indonesia. Pada tahun 2006, akhirnya, organisasi HTI berhasil mendapatkan ijin pengakuan dari pemerintah Indonesia. Dengan di legalisasikannya HT Indonesia membuat organisasi tersebut dapat lebih leluasa dalam bergerak dan membangun pengaruhnya di dalam instalasi pemerintahan. Pada tahun 2006, HTI mulai menyerukan khilafahnya di tempat-tempat umum secara lebih gamblang, seperti adanya kegiatan seminar yang di adakan di berbagai hotel dan kantor pemeritahan.⁸

Awalnya, Al-Baghdadi melakukan interaksi dengan para pengikut Islam di masjid *Al Ghifari* dan di IPB (Institut Pertanian Bogor).⁹ Pemikiran-pemikiran yang di ceritakan oleh Al- Baghdadi tentang Hizbut Tahrir, rupanya mampu menarik perhatian para aktivis masjid, setelah banyak menarik perhatian para aktivis di masjid, HTI mulai membuat *halaqah-halaqah* kecil atau dalam bahasa Indonesia artinya perkumpulan kecil guna memberitahukan gagasan-gagasan dari organisasi

⁸ Abd Qohar and Kiki Muhamad Hakiki, "Eksistensi Gerakan Idiologi Transnasional HTI Sebelum Dan Pasca Pembubaran," *Kalam* 11, no. 2 (2017): 365–396.

⁹ Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: Lkis, 2012).

Hizbut Tahrir. Kemudian, mulai masuk menyebarkan ajaran Hizbut Tahrir melalui Jaringan Lembaga Dakwah Kampus. Adanya, Jaringan Lembaga Dakwah perguruan tinggi ajaran-ajaran dari organisasi ini mulai tersebar di berbagai institusi Pendidikan tinggi hingga akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia.¹⁰

Meskipun demikian, harapan bagi pemerintahan yang cukup berbentuk untuk menyelesaikan seluruh rencana perubahan yang telah dimulai dan direncanakan oleh para mahasiswa mulai sekitar tahun 1998 adalah awal dari perubahan politik di Indonesia yang adil dan berbagai isu yang diidentifikasi dengan instrumen hukum yang dapat menjamin ketahanan politik masyarakat. negara yang menciptakan. Pemerintah populer di masa depan berubah menjadi masalah asli.

Di tengah diskusi tentang kekuasaan dan sikap otoritas publik sehubungan dengan arah masa depan negara, Islamis politik juga bergabung di dalam, meskipun fakta bahwa satu kelas utama Islam dan yang lain memiliki perspektif dan perspektif politik yang berbeda antara satu kelompok sosial Islam yang ketat. dan pertemuan Islam lainnya dalam bereaksi dengan cara yang tidak terduga. Perubahan yang terjadi, namun sikap yang berfungsi dalam bereaksi terhadap perubahan harus dijunjung tinggi. Reaksi yang diberikan oleh kelompok masyarakat Islam ini mengambil struktur yang berbeda-beda yang ditunjukkan oleh derajat kepentingan dan asumsi yang mereka inginkan. Pada dasarnya, reaksi umat Islam terhadap perubahan politik tidak jauh berbeda dengan reaksi non-Muslim atau patriot.

¹⁰ Azman, "Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia."

Metode setiap pertemuan politik ini berbeda dalam mengkomunikasikan mentalitas dan posisi politik mereka.

Bukan suatu hal yang aneh jika mentalitas politik umat Islam Indonesia semakin beragam. Tidak sedikit kelas dunia politik yang suka terlibat dengan kelompok ideologis yang tidak bertindak demi agama daripada pertemuan yang ketat. Namun, ada juga orang-orang yang menerima bahwa Islam dalam ajarannya menempatkan penekanan yang luar biasa pada pertempuran untuk mempertahankan *amar ma'ruf nahi munkar* (perintah untuk menerapkan yang benar dan menyangkal yang salah), dan untuk pertempuran ini "pakaian" Islam harus digunakan. Dengan demikian keputusan politiknya adalah partai yang ketat (Islam). Meski terdapat kontras sebagai "kendaraan" politik untuk mengesahkan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun substansi perjuangan yang muncul sebagai tanda mentalitas ini adalah mendukung perubahan politik ini secara tepat agar otoritas publik mempraktekkan kekuasaannya dengan keterpercayaan, kesetaraan, dan kepercayaan.

Indonesia adalah Negara yang memiliki dasar negara atau yang biasa disebut dengan berideologi. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyatakan kepada peserta BPUPKI perlunya bangsa ini memiliki dasar negara sebagai pedoman. Lima prinsip dari Soekarno ini akhirnya dikaji ulang oleh peserta dan akhirnya disetujui. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari sila atau lima asas.

Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama Mpu Tantular yang berarti

berbatu sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. Dalam bahasa sansekerta Pancasila berasal dari dua kata, yaitu “*Panca*” yang berarti lima dan “*Sila*” yang berarti dasar atau asas. Pada tanggal 22 Juni 1945 tepatnya pada Pukul 20.00 WIB panitia Sembilan mengadakan pertemuan di rumah Soekarno, dimana pertemuan tersebut pada akhirnya menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta charter*) yang didalamnya termuat rumusan kolektif dasar Negara Indonesia Merdeka.

Ideologi Pancasila ini sangat dipegang teguh oleh rakyat Indonesia hingga saat ini. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, perekonomian dan pendidikan rakyat Indonesia semakin berkembang. Ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja maupun menempuh ilmu pendidikan di luar negeri. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa, beberapa budaya luar akhirnya masuk secara tidak langsung bagi generasi-generasi selanjutnya yang dimana budaya tersebut dianggap suatu hal yang lumrah, bahkan ada yang pada masyarakat yang fanatik akan budaya-budaya baru tersebut.

Tidak hanya budaya, ideologi pun sering menjadi isu-isu pokok yang diangkat di panggung politik Indonesia. Bahkan tak jarang isu yang diangkat mengenai ideologi Pancasila inipun sering dipertentangkan kepada salah satu agama di Indonesia yakni agama Islam. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, namun hingga saat ini masih sulit untuk menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan yang bersahabat, finansial, politik dan hukum. Kemudian, pada saat itu, banyak pula umat Islam yang juga berpandangan bahwa Islam tidak seharusnya mengatur atau menguasai negara, biarkan masalah-

masalah yang kaku menjadi urusan pribadi dan perkumpulan-perkumpulan yang ketat akan mendorongnya, sedangkan negara cukup untuk mengarahkan koeksistensi dalam kehidupan mata publik.

Gerakan politik HTI ini pada dasarnya berfokus pada bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat untuk menerapkan hukum-hukum Syari'at agama Islam. HTI menganggap Syari'at agama Islam sebagai solusi terbaik dalam mengatasi segala problem hidup masyarakat. Gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan Hizbut Tahrir dianggapnya bersinonim dengan gerakan politik. Hal ini disebabkan karena politik merupakan bidang yang mengatur kehidupan masyarakat.¹¹

Adapun fenomena permasalahan politik yang cukup menarik untuk diangkat salah satunya diketahui HTI pernah tergabung bersama komponen umat Islam dalam Forum Umat Islam (FUI) pada 29 April 2005 untuk mengadakan diskusi publik dan demo besar bertema "Menolak Liberalisasi Air dalam Undang-Undang Sumber Daya Air di Jakarta". Dalam aksi tersebut, HTI sepakat untuk menolak Undang-Undang tersebut dan menuntut agar Undang-Undang tersebut diganti dengan peraturan yang sesuai dengan syari'at agama Islam yang mampu mempertahankan hak dasar rakyat atas air dan memungkinkan pengelolaan air secara adil.

Dari luar parlemen Hizbut Tahrir, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), LJ (Laskar Jihad), MMI (Majelis

¹¹ Selly, *Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir*, 2011. hlm. 60.

Mujahidin Indonesia), Lembaga Dakwah Kampus, dan Majelis Ta'lim, HAMMAS (Hiinpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus), serta Dewan Dakwah Islamiyah, kelompok-kelompok Islam lainnya di luar NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah mendorong MPR untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 tentang kehidupan umat beragama serta memasukkan Piagam Jakarta pada amandemen tersebut, akan tetapi tuntutan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari beberapa partai yang memiliki suara yang signifikan dalam parlemen.

Selain itu, yang paling fenomenal adalah pemberitaan kemenangan Anies Baswedan pada Pemilihan Gubernur Jakarta. Beredar sebuah narasi yang menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlibat kontrak politik dengan HTI. Narasi ini beredar di media sosial *facebook*. Adapun akun *facebook* yang mengungkap isu tersebut bernama Idah Nurhayati dimana pada tanggal 17 September 2020 ia membagikan sebuah narasi yang menampilkan gambar foto Anies Baswedan bersama tokoh HTI Ismail Yusanto. Kemudian gambar tersebut disertai pula semacam secarik kertas kontrak politik yang bertanda tangan Anies Baswedan.

Secara tegas Anies Baswedan langsung membantah hal tersebut, dimana bantahan tersebut ia lontarkan ke beberapa kesempatan saat ia diwawancarai oleh awak media. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan di beberapa pemilihan kepala daerah telah disusupi oleh HTI dengan gerakan bawah tanahnya yang lebih bersifat sosialisasi kepada masyarakat maupun organisasi masyarakat yang masih mencari eksistensi dalam kancah politik Indonesia.

Kemudian masih terkait dengan pemenangan Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta adalah pada saat gerakan 212, banyak bermunculan bendera-bendera yang disinyalir sebagai bendera HTI. Kemunculan HTI pada gerakan tersebut adalah untuk semakin menggencarkan salah satu syari'at agama Islam untuk memilih pemimpin dari calon yang beragama Islam, dimana hal ini terbukti pada kekalahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dan gaungan terhadap syari'at agama Islam tersebut juga menyeruak di berbagai media baik media sosial maupun televisi.

Berbagai fenomena tersebut menjadi sebagai salah satu alasan dalam lingkup spesifik HTI dibubarkan. Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut status badan hukum HTI pada tanggal 19 Juli 2017. Walaupun HTI mencantumkan Pancasila pada dasar pembentukan lembaga mereka, akan tetapi berbagai kegiatan dari organisasi tersebut dinilai oleh pemerintah bertentangan dengan lima sila Pancasila dikarenakan mereka mencoba mengubah ideologi pancasila menjadi khilafah.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu terhadap latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis memahami pergerakan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nantinya, penulis dalam melakukan penelitian ini mampu menjabarkan secara komprehensif dan terfokus, maka peneliti memiliki pertanyaan rumusan dari permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan berikut :

1. Bagaimana konsep khilafah yang digunakan oleh Hizbut Tahrir dalam mempengaruhi negara Islam?
2. Mengapa Indonesia membubarkan Hibzbut Tahrir Indonesia (HTI)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis dalam mengambil topik yang berjudul memahami pergerakan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang di Indonesia memiliki tujuan antara lain

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep khilafah yang digunakan oleh Hizbut Tahrir dalam mempengaruhi negara Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan Indonesia membubarkan Hibzbut Tahrir Indonesia (HTI).

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi wawasan baru bagi para pembaca.

1. Tulisan ini diharapkan menjadi pengalaman yang baik bagi penulis serta mengasah kemampuan penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah serta sebagai sarana edukasi khususnya pada akademisi dari Jurusan Hubungan Internasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk menambah wawasan serta pemahaman tentang paham suatu ideologi dan ajaran suatu agama.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun skripsi ini dibuat dengan didasari oleh sistematika yang disusun secara terstruktur. Berikut adalah struktur penelitian secara lengkap:

BAB I: Pada pengisian Bab I ini terdiri dari lima macam sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Pada pengisian Bab II ini terdiri dari dua macam sub bab diantaranya terdiri dari tinjauan pustaka, teori dan konsep.

BAB III: Metode Penelitian: Pada pengisian Bab III ini terdiri dari dua macam sub bab diantaranya terdiri dari pendekatan ilmiah, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: Pada pengisian Bab IV ini terdiri dari kumpulan data yang peneliti temukan berdasarkan sumber data, dan analisa. Adapun keduanya digabungkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya di Bab II.

BAB V: Kesimpulan dan Saran: Pada pengisian bab terakhir ini akan terdiri dari beberapa simpulan yang didapat dari pengolahan data yang telah dikemukakan pada Bab IV.